

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah menjalin hubungan dengan Amerika Serikat (AS) sejak tahun 1949 melalui perwakilan Indonesia yang diwakilkan langsung oleh Kementerian Luar Negeri saat itu Dr. A.K. Gani yang mengemban tugas untuk menjalin hubungan dagang dengan AS. Peristiwa itu tidak hanya menjadi sejarah namun secara resmi Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan AS. Lazimnya sebuah hubungan tentu tidak akan selalu berjalan mulus. Beberapa kali hubungan antara AS dengan Indonesia mendapati hal yang kurang menguntungkan. Seperti halnya AS pada masa orde baru pernah melakukan embargo terhadap persenjataan militer. Akan tetapi berbanding terbalik pada sektor investasi tentu sudah menjadi rahasia umum di mana pada era orde barulah pemerintah Indonesia mengeluarkan izin mengenai penanaman modal asing. Tepat pada 7 April tahun 1967 Presiden Soeharto secara resmi merealisasikan investasi asing di sektor tambang yang dikelola oleh *Freeport Sulphur of Delaware* (Mukthi, 2015). Pelaksanaan realisasi ini juga tidak hanya dikatakan sebagai realisasi pertama dengan kata lain merupakan sejarah awal di mana terjadinya modal asing (investasi) masuk ke Indonesia. Pasca realisasi pertama ini pada akhirnya membuat kepercayaan dunia internasional makin percaya kepada Indonesia sehingga banyak negara-negara mulai menanamkan modalnya di Indonesia.

Demi memperlancar jalannya hubungan ekonomi antara Indonesia dan AS kedua negara ini sempat membahas dalam perundingan *United States - Indonesia Comprehensive Partnership Agreement* (US-Indonesia CPA) perundingan itu dilaksanakan pada tahun 2010 di bawah kepemimpinan Presiden SBY. Awal dari perundingan itu sebetulnya telah diusulkan pada tahun 2008 dalam acara USINDO presiden SBY berpidato bahwasannya kemitraan yang nyata dan menghasilkan terjadi ketika hal tersebut menguntungkan rakyat Indonesia dengan pelaksanaan kemitraan yang nyata melalui *people to people* dan berjangka panjang. Sebelumnya juga dari

pihak AS sendiri melalui pernyataan menteri luar negerinya Clinton pada bulan Februari 2009 AS juga ingin menjalankan suatu kemitraan dengan Indonesia yang berjalan konkret. Hal tersebut juga ditambah dengan pernyataan menteri luar negeri Indonesia saat itu Natalegawa mengatakan bahwa suatu kemitraan itu juga harus mencakup berbagai sektor-sektor penting dalam proses pembangunan, mengingat Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berkembang tentu langkah tepat adalah menjalin bisnis. Salah satunya mendukung investasi dua arah yang berisikan dorongan inovasi melalui kolaborasi, pertukaran teknis, pelibatan pembuat kebijakan, pemangku kepentingan di sektor investasi dan masyarakat umum (Yerichielli, 2019).

Foreign Direct Investment (FDI) bagi Indonesia sendiri adalah salah satu penggerak perekonomian negara. Sebagai negara berkembang tentunya Indonesia membutuhkan banyak FDI dalam meningkatkan perekonomiannya. FDI dinilai tepat bagi Indonesia yang pada tahun-tahun ini bonus demografi sedang dinikmati oleh Indonesia. Tentunya harus ada wadah yang membuat mereka mendapatkan pekerjaan yang pada akhirnya menguntungkan negara lewat penarikan pajak. Sebagai negara kepulauan yang luas dan memiliki sumber daya yang banyak Indonesia tentunya menjadi pasar yang menggiurkan bagi para investor luar negeri. Kebutuhan mereka dalam mengembangkan bisnisnya menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan utama untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Melihat begitu potensialnya Indonesia tentunya pemerintah membentuk lembaga negara yaitu Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM). Tujuan pembentukan badan ini dinilai memiliki peranan penting dalam perkembangan FDI di Indonesia dengan memiliki banyak perwakilan di berbagai negara sebagai upaya mendorong peningkatan FDI ke Indonesia seperti *Indonesia Investment Promotion Center New York* atau IIPC New York (BKPM, 2017).

AS sebagai salah satu negara maju yang pada pola sistem ekonominya berbasis kapitalisme liberal. Penanaman modal atau melakukan investasi ke salah satu negara merupakan salah satu prinsip penerapan ekonominya. Dikenal sebagai negara investor tentunya AS memiliki banyak sekali penanaman modal di berbagai negara. Meskipun

pada realisasinya investasi AS lebih banyak dialirkan ke negara-negara Eropa (Statista.com, 2021). Hal ini juga menjadi salah satu alasan AS yang tetap berpegang teguh dalam mengalirkan dananya ke negara yang mengimplementasikan sistem liberal. Meski demikian peluang bagi Indonesia sendiri tentunya cukup lebar mengingat AS sebagai negara adidaya tentunya menjadi catatan penting bagi Indonesia untuk mendapatkan FDI dari AS. Mengutip dari laman US News Indonesia menempati negara urutan ke 2 sebagai *Best Countries to Invest* (US News, 2021) dalam realisasinya sendiri AS meninjau Indonesia sebagai negara yang memiliki GNP tinggi sebesar \$1.12 triliun ditambah dengan populasinya yang mencapai 271 juta jiwa. Data ini membuat Indonesia sebagai negara berkembang haruslah dapat dimanfaatkan dengan baik meski realisasi investasi dari AS masih belum terlalu optimal bila dibandingkan dengan negara-negara di Asia seperti Singapura, Tiongkok, Jepang dan Malaysia.

Upaya demi upaya tentunya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam tujuan meningkatkan investasi dari AS. Di beberapa kesempatan Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa diplomasi ekonomi memerlukan peningkatan sebagaimana menjadi salah satu prioritas dari kebijakan luar negeri. Melalui Kementerian Luar Negeri Retno Marsudi prioritas kebijakan ini mewajibkan seluruh jajaran misi diplomatik Indonesia di luar negeri demi pencapaian kepentingan nasional dalam bidang ekonomi. Pada era ini pemerintahan Presiden Jokowi tampak mulai menyadari bahwa diplomasi yang diterapkan oleh Indonesia terlalu terpacu pada aspek politik dan keamanan yang dimana aspek ekonomi sedikit terabaikan. Pada pelaksanaannya urgensi dari diplomasi ekonomi juga tidak terlepas dari rencana Presiden Jokowi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan kemandirian dalam bidang ekonomi dengan menciptakan mobilisasi perdagangan internasional dan investasi asing yang dimana pemerintah sebagai fasilitator dan regulator (BPPK Kemlu, 2016). Di suatu kesempatan menteri koordinator bidang kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan kepada para diplomat Indonesia untuk mengedepankan diplomasi ofensif. Hal ini juga tidak terlepas dari setiap isu di dunia internasional pada berbagai bidang

baik itu politik maupun ekonomi. kedepannya Indonesia harus bisa mengantisipasi dan merencanakan aksi lebih dahulu dibandingkan negara lain. Hal ini juga yang nantinya menjadi dasar pada posisi kebijakan Indonesia menghadapi situasi global yang terus berkembang (Richard, 2018).

Pada realisasinya sektor primer pada pertambangan masih menjadi nilai terbesar dari investasi yang dilakukan AS di Indonesia. Perusahaan-perusahaan seperti Caterpillar, Chevron, hingga Freeport banyak melakukan perluasan di berbagai daerah di bagian Indonesia timur (Detikfinance, 2011). Disisi lain Ada beberapa sektor yang dapat dijadikan peluang besar salah satunya adalah industri makanan dan minuman pada periode tiga tahun terakhir industri makanan dan minuman yang masuk dari berbagai negara di dunia ke Indonesia mengalami fluktuasi yang cukup signifikan.

Tabel 1.1 Realisasi investasi asing secara keseluruhan pada industri makanan dan minuman di Indonesia periode 2015-2017

PMA	2015		2016		2017	
	Proyek	Nilai	Proyek	Nilai	Proyek	Nilai
Industri Makanan	1170	1367354	1735	1766765	1435	1545471
Industri Minuman	127	153782,5	173	340239	170	314111
Total	1297	1521137	1908	2107004	1605	1859582

Keterangan: nilai dalam satuan ribu US\$

Sumber: NSWI.BKPM diolah oleh Peneliti

Dari tabel 1.1 diketahui bahwa prospek dari fluktuasi pertumbuhan investasi di industri makanan dan minuman cukup signifikan secara keseluruhan investasi yang masuk ke Indonesia pada tahun 2015 total mencapai 1.521.137 dan mengalami peningkatan pada tahun berikutnya dengan selisih mencapai 585.867 lalu kembali terjadi penurunan pada tahun 2017 dan nilai yang dicapai sebesar 1.859.582 atau minus dari tahun sebelumnya sebesar 11,7%.

Tabel 1.2 Realisasi investasi asing dari AS pada industri makanan dan minuman
Periode 2015-2017

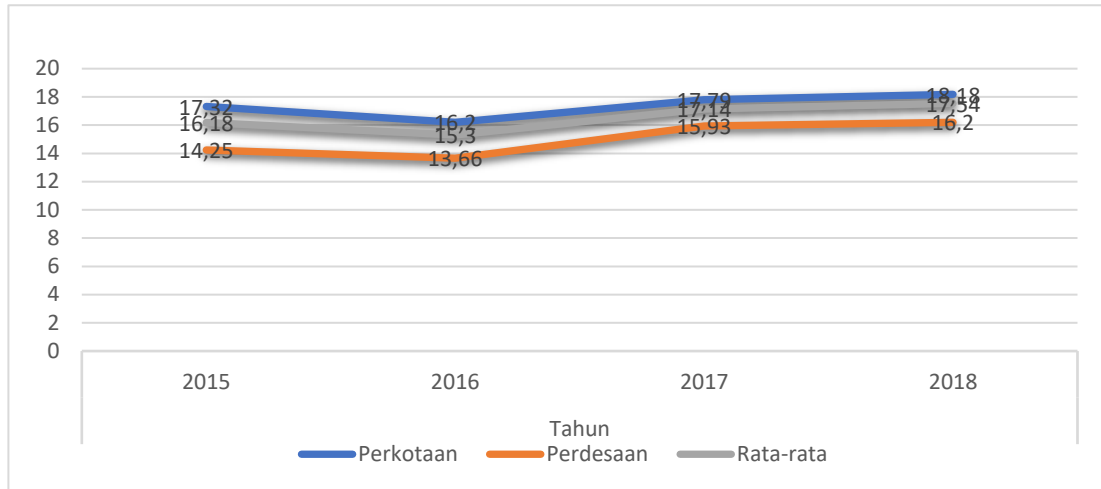
PMA	2015		2016		2017	
	Proyek	Nilai	Proyek	Nilai	Proyek	Nilai
Industri Makanan	20	30.573,20	24	14017,4	16	12690,4
Industri Minuman	0	N.A.	0	N.A.	2	N.A.
Total	20	30.573,20	24	14017,4	16	12690,4

Keterangan: Nilai dalam satuan ribu US\$

Sumber: NSWI.BKPM diolah oleh Peneliti

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa penurunan nilai yang terus terjadi setiap tahunnya. Dari tahun 2015 ke 2016 terjadi penurunan dengan selisih 1.655.580 atau minus sekitar 54,1% dan dari tahun 2016 ke 2017 juga kembali terjadi penurunan dengan selisih 1.327 atau minus sekitar 9,4%. Sementara di industri makanan dan minuman investor AS belum banyak menanamkan modalnya di Indonesia. Akan tetapi jika ditinjau lebih jauh banyak sekali perusahaan makanan dan minuman asal AS yang berpotensi untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Seperti yang sudah lama berada PT Mondelez Indonesia produsen makanan Oreo, Dairy milk, Toblerone (ID.Mondelez, 2017). Lalu untuk industri minumannya ada anak perusahaan dari Coca Cola Company atau PT Coca Cola Amatil Indonesia (IDX channel, 2019). Industri minuman memang belum banyak melakukan realisasi di periode ini akan tetapi jika melihat prospeknya Indonesia sebagai negara dengan banyaknya jumlah warga negara tentu konsumsi masyarakat juga tinggi. Seperti yang tertera pada grafik di bawah ini.

Grafik 1.1 Presentasi rata-rata dari total pengeluaran penduduk Indonesia selama sebulan untuk konsumsi produk makanan dan minuman jadi berdasarkan daerah perkotaan dan pedesaan 2015-2018 per april-september setiap tahunnya



Sumber: Sensus Nasional BPS (2018) diolah oleh Peneliti

Pada grafik 1.1 terlihat bahwasannya daerah-daerah di Indonesia baik itu di perkotaan maupun pedesaan selama sebulan dari total pengeluaran mereka. Mereka menggunakan sekitar 16,54% untuk belanja konsumsi makanan dan minuman jadi. Daerah perkotaan memang memiliki nilai tinggi dalam tingkat konsumsi makanan dan minuman jadi. Akan tetapi, pada tahun 2016 terjadi penurunan nilai konsumsi masyarakat sebesar 1,12% lalu kembali naik pada tahun 2017 dan menyentuh nilai tertinggi pada 2018 sebesar 18,18% atau naik sebesar 1,98%. Sementara untuk daerah pedesaan hanya memiliki selisih perbedaan sedikit jika dibandingkan dengan perkotaan sekitar 3%. Data menunjukkan bahwasannya nilai konsumsi masyarakat Indonesia mengalami peningkatan dan hal dapat dijadikan sebagai *bargaining power* guna mendorong nilai investasi dari luar negeri. Mengutip dari Kontan.id ada 3 faktor utama Indonesia menjadi primadona investasi di industri makanan dan minuman Rahmat Hidayat wakil ketua umum GAPMMI mengatakan yaitu dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa lalu Indonesia relatif kaya akan bahan baku untuk keperluan industri makanan dan minuman dan yang ketiga perusahaan akan melihat Indonesia sebagai potensi untuk mendapati pasar ASEAN yang dimana hal tersebut juga

berkaitan pada implementasi MEA dan menjadikan Indonesia sebagai basis produksinya (Yogatama, 2015).

Pelaksanaan diplomasi juga dilakukan dalam rangka mendorong hal tersebut. Pada tahun 2015 wapres JK menemui banyak investor AS di berbagai sektor usaha salah satunya adalah perwakilan dari The Halal Guys. Melalui acara *American-Indonesian Chamber of Commerce (AICC)* dan *US-ASEAN Business Council (USABC)* dimana Wakil Presiden juga menyampaikan pokok-pokok prioritas kebijakan ekonomi Pemerintahan Presiden Jokowi, menyampaikan berbagai perkembangan dan gebrakan terbaru pemerintah dalam rangka mengurangi hambatan berinvestasi di Indonesia, deregulasi, dan menyampaikan pentingnya kontribusi investasi dan kehadiran berbagai perusahaan AS untuk membantu meningkatkan perekonomian Indonesia (The Embassy of the Republic of Indonesia, 2015). Pada bulan Juni tahun 2015 upaya diplomasi dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah dengan GAPMMI. Ketua GAPMMI saat itu Adhi S. Lukman mengatakan bahwa forum bisnis ini dilaksanakan di AS yang akan berfokus menarik investor untuk mendirikan industri makanan dan minuman di Indonesia. Setelah sebelumnya pihak GAPMMI sempat berbincang dengan perwakilan Cargill dimana mereka juga akan melanjutkan investasi di Indonesia dengan mendirikan pabrik baru (Amna, 2015).

Secara legalitas dan proses perizinan realisasi investasi memang memerlukan waktu normal 2 tahun maka apabila promosi dilakukan di tahun 2015 dan 2016 maka hasil dari diplomasi tersebut baru bisa di 2 tahun atau sekitar 793 hari (BKPM, 2015). berikutnya pada tahun 2016 pemerintah pada saat itu juga melakukan upaya investasi melalui kepala BKPM saat itu indonesia gencar melakukan promosi di beberapa kota besar di AS seperti Chicago, San Francisco, dan New York dalam keterangannya tujuan dari promosi investasi tersebut adalah mendorong investasi di industri makanan dan minuman (Tempo.co, 2016). Akan tetapi, pasca promosi di tahun tersebut nilai investasi yang di dapat pada tahun 2018 hanya mencapai 714,2 (dalam satuan ribu US\$)

Tabel 1.3 Realisasi Investasi AS di industri makanan dan minuman Tahun 2015-2021

PMA	Industri Makanan		Industri Minuman		Total	
	Proyek	Nilai	Proyek	Nilai	Proyek	Nilai
2015	20	30573	0	N.A.	20	30573
2016	24	14017	0	N.A.	24	14017
2017	16	12690	2	N.A.	18	12690
2018	9	714	1	N.A.	10	714
2019	20	8551	1	N.A.	20	8551
2020	41	28900	4	N.A.	45	28900
2021	18	55862	1	N.A.	19	55862

Keterangan: Nilai dalam satuan ribu US\$

Sumber: NSWI.BKPM diolah oleh Peneliti

Point menarik yang dapat dilihat disini adalah bawahsannya selama 2015-2018 Nilai investasi dari AS pada industri makanan dan minuman terus mengalami penurunan. Pada promosi yg dilakukan tahun 2016 hasil menunjukkan terhitung pada 2 tahun berikutnya nilai di tahun 2018 hanya mencapai 714,2 dari 10 proyek. Baru tren positif dapat mulai dirasakan pada tahun 2019 terdapat selisih 7.836,9 atau naik lebih dari 10 kali lipat dari tahun sebelumnya. Tren kenaikan juga terus terjadi hingga pada tahun 2020 dan 2021 yang pada akhirnya menyentuh angka di 28.900,4 dan 55.861,9 dengan total proyek 41 dan 18. Hal ini juga mengindikasikan peran signifikan yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2018 dalam melayani mitra investasinya. Tentu menarik jika kita melihat bagaimana diplomasi ditambah dengan peran-peran lainnya seperti meningkatkan kualitas iklim investasi yang dilakukan oleh pemerintah di mulai pada tahun 2018 sehingga investasi terjadi peningkatan di tahun berikutnya.

Dalam targetnya sendiri pemerintah melalui koordinasi BKPM dan Kemenperin di tahun 2018 juga menegaskan bahwa sektor manufaktur yang salah satunya adalah Industri makanan dan minuman tengah mencoba mencapai pola industri

4.0. yang membuat hal tersebut sebagai satu dorongan agar transfer teknologi lebih banyak dinikmati oleh Indonesia (BKPM, 2020). Merujuk pada RIPIN 2015-2035 pemerintah juga menjadikan industri makanan dan minuman sebagai industri prioritas dan berfokus pada peningkatan kerjasama industri internasional untuk alih teknologi, peningkatan investasi serta penguasaan pasar ekspor pada periode 2015-2019. Guna menjaga nilai produksi dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan pangan (Kemenperin, 2015). Dalam pelaksanaan proyeknya pemerintah Indonesia telah menawarkan sejumlah kawasan khusus guna memenuhi keperluan produksi dalam negeri. Sebagai contoh Industri coklat di blitar yang ditawarkan oleh IIPC New York lalu ada Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE) di dalam dialog US-Indonesia investment summit (Tempo, 2016)

Memasuki tahun 2020 dimana kondisi dunia masih dihadapkan dengan permasalahan pandemi Covid-19 tidak terkecuali Indonesia pandemi Covid-19 banyak menyebabkan permasalahan di sektor-sektor penopang perekonomian negara kebijakan memakai masker, menjaga jarak dan *work from home*. Menyebabkan banyak industri yang kesulitan dan terdampak pada nilai produksi dan pendapatan salah satunya adalah industri makanan dan minuman. Mengutip pernyataan dari wakil ketua gabungan asosiasi pengusaha makanan minuman (GAPMMI) mengatakan bahwa penjualan dari industri makanan dan minuman hanya dapat membuat target 4% yang awalnya berekspektasi mampu mencapai 10% bahkan pada periode 3 bulan pertama tahun 2020 industri makanan dan minuman hanya mencapai 2% total penjualan turun dari target yang ditetapkan sebesar 2,5% hal ini tentunya diakibatkan adanya penurunan di sektor penjualan minuman kemasan imbas dari kebijakan larangan kerumunan selama tahun 2020 (Yunianto, 2020).

Pada sektor ini banyak perusahaan-perusahaan yang membatasi produksinya karena lambatnya *supply chain* dari bahan yang akan dipakai, pandemi Covid-19 juga membuat beberapa produsen *raw material* dan para distributor untuk melakukan kebijakan yang juga membatasi penyebaran Covid-19. Mengutip dari pernyataan *Chairman supply chain Indonesia (SCI)* menegaskan untuk menekan angka Covid-19

yang terjadi distribusi barang dan pergerakan manusia harus dibatasi dan dikendalikan secara beriringan. Baik itu merujuk ke salah satu wilayah yang berada di zona merah, maupun hitam distribusi barang bahan tetap harus terlaksana (Alfatiyah, 2020). Demi mencegah hal itu terjadi pemerintah Indonesia tentunya memiliki beberapa agenda dalam upaya pemulihan ekonomi mulai dari kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui kebijakan fiskal pengenaan pajak yang dinaikan, lalu untuk non fiskal pada tahun 2020 Kementerian Keuangan menyetujui untuk menerapkan kebijakan pengurangan lartas atau larangan terbatas. Dampak dari kebijakan ini merupakan andil besar bagi pergerakan laju bahan baku di industri makanan dan minuman (Hendartyo, 2020). Di tahun tersebut seperti yang diketahui jumlah Investasi AS ke Indonesia di industri makanan dan minuman justru meningkat bahkan di tengah kondisi ketidakpastian untuk berinvestasi. Peran efektif ditunjukkan oleh pemerintah sebagai salah upaya pemulihan perekonomian negara. Tentunya butuh peran dan komunikasi yang baik dalam meyakinkan para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia ditengah kondisi yang tidak pasti.

Implementasi dari diplomasi ekonomi juga penting dilakukan mengingat komitmen dari pemerintahan Jokowi yang memberi perhatian lebih besar pada pelaksanaan diplomasi ekonomi. Adanya upaya yang nyata dimana pemerintah Indonesia saat ini mendorong terciptanya lapangan pekerjaan dengan mengupayakan para investor asing untuk membuka pabrik pengolahan SDA di Indonesia tidak hanya itu keuntungan dari nilai tambah produk juga tidak sepenuhnya jatuh ke pihak asing. Serta adanya upaya sebagai regulator dengan menyederhanakan prosedur perizinan investasi melalui pelayanan satu pintu melalui BKPM (BPPK Kemlu, 2016).

Diskursus mengenai penelitian tentang diplomasi ekonomi memang telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Sebagai bagian dari upaya suatu negara memenuhi kepentingan nasionalnya. Diplomasi ekonomi memiliki beberapa turunan dalam pelaksanaannya salah satunya adalah diplomasi komersial. Secara umum diplomasi komersial merupakan diplomasi yang dijalankan oleh aktor negara dalam upaya membuka maupun mempererat jalinan hubungan secara G to B, yang

kedepannya nanti membantu kepentingan para aktor bisnis. Diplomasi komersial merupakan cara negosiasi atau melakukan promosi yang dilakukan oleh *State Actor* yang target utamanya adalah para pebisnis (Kostecki & Naray, 2007). Dalam penelitian ini peneliti melakukan *literature review* dan membaginya menjadi 3 topik (diplomasi komersial Indonesia, hubungan Indonesia-AS, dan FDI di sektor *food industry*) untuk diplomasi komersial yang telah dilakukan Indonesia terhadap sejumlah negara. Penelitian Irawan dan Kartasmita (2016) mengenai Indonesia ke Belanda pada masa presiden SBY diplomasi komersial yang dilakukan pemerintah mengalami kendala dari segi koordinasi antara kementerian. Selama tahun tersebut peran Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombak diplomasi ekonomi masih sangat minim. Killian (2015) menjelaskan fokus Investasi masih mengalami fluktuasi yang tidak stabil. Ada beberapa prosedur yang seharusnya dapat terus ditingkatkan seperti halnya pengenalan potensi daerah sebagai wilayah investasi melalui para perwakilan Indonesia di luar negeri yang sampai saat ini statusnya hanya bersifat insidental dan tidak rutin dilakukan. Bukhari dan Surya (2019) Indonesia terhadap negara Visegrad (Eropa Tengah). Dalam realisasinya sendiri diplomasi komersial yang dilakukan oleh Indonesia sangat terbatas. Koordinasi antar kementerian masih perlu ditingkatkan dan untuk mendorong investasi sendiri Indonesia melalui BKPM memerlukan banyaknya *representative* di negara-negara Visegrad. Sementara Arum dan Suryadipura (2021) mengenai Indonesia ke Kenya menekankan bagaimana penetrasi yang dilakukan oleh Indonesia melalui diplomasi komersialnya seperti pembentukan satgas infrastruktur dibawah Kemenko Marves dalam meninjau potensi investasi yang dapat dilakukan.

Literatur mengenai hubungan Indonesia dan AS dijelaskan oleh Yerichieli (2019) dalam jurnalnya diketahui bahwa sebelum realisasi kerjasama *comprehensive* disepakati aliran FDI dari AS pada tahun 2010 mencapai US\$ 930,8 juta, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 542,7%. Untuk perkembangan perdagangan dan investasi sendiri Indonesia dan AS membentuk *Trade Investment Council* guna menyelesaikan permasalahan mengenai perdagangan dan investasi di melalui tingkat menteri. Pada 14 april tahun 2010 perjanjian mengenai investasi juga di disepakati

melalui *Investment Support Agreement-Overseas Private Investment Corporation* (ISA-OPIC) RI-AS. Selanjutnya memasuki tahun 2016 dimana terjadi pergantian presiden AS timbul pertanyaan bagaimana hubungan Indonesia AS pasca terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS. Muhammad (2016) menjelaskan bahwa jalinan hubungan antar kedua negara haruslah dapat diteruskan. Hal ini juga ditandai dari apresiasi presiden Joko Widodo pasca terpilihnya Donald Trump menjadi presiden. Aer (2021) meski pada masa pemerintahan Trump terjadi perang dagang antara China dengan AS. Hal tersebut sempat mempengaruhi hubungan Indonesia dengan diketahui beredarnya isu pencabutan Indonesia sebagai penerima insentif GSP akan tetapi, hal tersebut tidak terjadi dan hubungan Indonesia AS tetap berjalan baik.

Selanjutnya literatur mengenai FDI pada *Food Industry* Makki, et. al., (2004) melihat hasil signifikan dari adanya FDI pada industri makanan. Negara seperti China, Brasil, Malaysia, Indonesia, Meksiko, dan Afrika selatan merupakan pasar baru bagi investasi AS di sektor *food industry*. Bolling, et. al., (1998) dalam penelitiannya meninjau bagaimana FDI AS pada *Food Industry* di negara *western hemisphere* terbagi dan berbeda-beda pada eksekusinya. Sejalan dengan seberapa besar faktor produksi di negara tersebut seperti di Kanada penggilingan tepung, Brazil produksi biskuit, Argentina dengan pengolahan daging, dan Meksiko pada pengolahan kedelai, tepung dan lainnya. Sebagai bagian dukungan terhadap urgensi masalah penelitian peneliti diketahui pada masa presiden SBY diplomasi komersial masih belum efektif, baru memasuki pemerintahan Jokowi diplomasi komersial Indonesia mulai menemui hasil yang progresif ditambah terjaganya hubungan antara Indonesia-AS serta melihat adanya potensi Indonesia sebagai segmen baru bagi investasi di sektor industri makanan.

Berdasarkan literatur yang sudah ada sampai saat ini belum ada yang membahas bagaimana diplomasi komersial Indonesia ke AS untuk mendorong investasi di industri makanan dan minuman. Guna mengisi *gap* akademik tersebut maka penelitian ini akan berfokus pada hal tersebut. Selain itu literatur terdahulu juga menjadi landasan guna mempertajam analisa peneliti dalam menjelaskan penelitian ini. Dikarenakan adanya

irisan yang sesuai sebagai sehingga akan membantu pada penelitian yang berjudul Diplomasi komersial Indonesia untuk mendorong investasi dari AS di industri makanan dan minuman 2018-2021.

1.2 Rumusan Masalah:

Merujuk pada latar belakang permasalahan diatas menunjukkan bahwa adanya peranan signifikan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui aktor-aktornya dalam bernegosiasi atau melakukan promosi kepada para investor AS dimana pada tahun pasca promosi dilakukan di tahun 2016 yang pada akhirnya mengalami penurunan realisasi investasi di sektor industri makanan dan minuman, hingga pada akhir tahun 2019 kembali mengalami tren peningkatan realisasi dan hal itu juga terjadi di tahun 2020 meski di tengah kondisi krusial atau ketidakpastian bagi seorang investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara. Dalam kasus ini tentunya pemerintah sebagai regulator dan juga memiliki perwakilan di negara AS memainkan peranan penting dalam mengembalikan realisasi investasi khususnya di industri makanan dan minuman. Oleh sebab itu peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut.

Bagaimana diplomasi komersial Indonesia untuk mendorong investasi dari AS di industri makanan dan minuman periode 2018-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

A. Menjelaskan bagaimana peran pemerintah melalui diplomasi komersial dalam mendorong investasi dari AS di industri makanan dan minuman periode 2018-2021.

B. Menjelaskan keunggulan yang dimiliki Indonesia dalam menguatkan diplomasi komersial sehingga investasi dari AS bisa terealisasi khususnya di industri makanan dan minuman.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Sebagai Manfaat Akademis

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dan referensi terkait isu diplomasi komersial Indonesia ke AS. Lalu, berguna bagi orang atau mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang serupa. Serta sebagai masukan bagi para peneliti lain sebagai pertimbangan untuk menyempurnakan hasil penelitian mereka. Sebagai manfaat praktis

B. Sebagai Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana data maupun referensi sebagai pengembangan dari studi ilmu hubungan internasional. Mengetahui perihal bagaimana keunggulan dan diplomasi komersial yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap negara adidaya seperti AS dalam mendorong investasi untuk direalisasikan di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memahami alur dalam penelitian ini maka peneliti membaginya yang terdiri dari bab dan sub bab. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan terdiri dari VI bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari penjelasan tinjauan pustaka terkait perbandingan penelitian ini dengan penelitian sebelum-sebelumnya sesuai

dengan topik yang relevan, lalu menjelaskan tentang konsep dan teori yang akan digunakan, dan alur pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang penggunaan metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti, serta bagaimana peneliti mencari sumber data dan mengolah data.

BAB IV POTENSI INDONESIA BAGI INVESTOR

Menjelaskan tentang aspek yang dimiliki oleh Indonesia dalam hal ini sebagai suatu potensi yang menarik bagi investor guna menanamkan modalnya di Indonesia.

BAB V DIPLOMASI KOMERSIAL INDONESIA KE AS PADA INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN 2018-2021

Menjelaskan bagaimana diplomasi komersial yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mendatangkan investasi dari AS pada Industri makanan dan minuman 2018-2021 dan menjelaskan tentang pada pelaksanaan diplomasi.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA